



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0011 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Informasi Publik, PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi daftar informasi publik, perlu adanya Daftar Informasi Publik Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum tentang Daftar Informasi Publik Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 201 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 741);
7. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Hukum ini.

- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap bagian di lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 8 Mei 2026

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI
DKI JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Bagian di Lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ~~e-0011~~ TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIRO HUKUM SETDA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Ringkasan Isi Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu penyimpanan atau retensi Arsip	Jenis media yang memuat informasi
A	INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
	Informasi Umum							
1	Profil Organisasi /struktur organisasi	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah, Biro Hukum berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dengan tugas melaksanakan perumusan, pemantauan, dan	Bagian Peraturan Perundang - undangan I	Subbagian Tata Usaha Biro	Tahun 2026 Jakarta	Online	Selama berlaku	

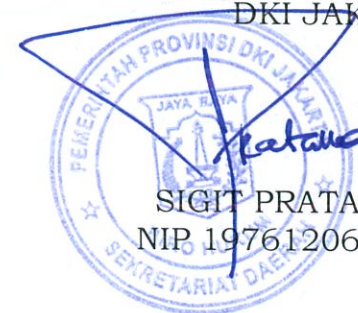
		evaluasi kebijakan terkait penyusunan produk hukum daerah, dokumentasi dan informasi hukum, advokasi hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan pengetahuan hak asasi manusia.						
2	Pelayanan Biro Hukum	Memuat informasi layanan , pengelolaan administrasi di lingkungan Biro Hukum	Bagian Peraturan Perundang-undangan I	Subbagian Tata Usaha Biro	Tahun 2026 Jakarta	Hard dan softcopy file pdf	Selama berlaku	https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/1673/peraturan-gubernur-nomor-99-tahun-2021-tentang-tata-naskah-dinas
3	Tugas dan Fungsi	Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Biro Hukum berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022	Bagian peraturan perundang-undangan I	Subbagian Tata usaha Biro	Tahun 2026 jakarta	Hard dan softcopy file pdf	Selama berlaku	https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/5877/peraturan-gubernur-nomor-57-tahun-2022-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-perangkat-daerah
4	Visi dan Misi	Memuat informasi mengenai visi dan misi Biro hukum	PPID Provinsi	PPID Provinsi	Tahun 2026, Jakarta	Hard dan softcopy file pdf	Selama berlaku	https://www.jakarta.go.id/visi-misi https://jdih.jakarta.go.id/PPID/Informasi
5	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 121 tahun 2020	Seluruh Bagian Biro Hukum	Seluruh Subbagian	Tahun 2025, Jakarta	Hard dan softcopy file pdf	Selama berlaku	https://sakip.jakarta.go.id/dki-front/

6	Dokumen rencana Strategis Biro Hukum	Menyajikan informasi mengenai Rencana Strategis Biro Hukum	Bagian peraturan Perundang-undangan I	Subbagian Tata Usaha Biro	Tahun 2025, Jakarta	Hard dan softcopy file pdf	Selama berlaku	https://jdih.jakarta.go.id/PPID/Informasi
7	Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan, Dan/atau Kebijakan Yang Mengikat dan/atau Berdampak Bagi Publik Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Menyajikan peraturan , Keputusan dan/atau Kebijakan yang mengikat dan /atau berdampak bagi publik	Bagian Peraturan Perundang-undangan I	Subbagian Tata Usaha Biro	Tahun 2025, Jakarta	File pdf	Selama berlaku	https://jdih.jakarta.go.id/
8	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Pejabat Badan Publik	Menyajikan pedoman produk hukum kaitan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik	Bagian Peraturan Perundang-undangan I	Subkelompok Peraturan Perundang - undangan bidang Pemerintahan	2025, Jakarta	Softcopy file pdf	Selama berlaku	https://sipadu.jakarta.go.id/ https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/14169/peraturan-gubernur-nomor-49-tahun-2024-tentang-pengelolaan-pengaduan-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta
B	INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
	INFORMASI UMUM							
1	Informasi tentang Pelayanan	Data ini berisi tentang pelayanan JDIH yang dilayani oleh Biro Hukum	Bagian Peraturan Perundang - undangan I	Subbagian Tata Usaha Biro	2025, Jakarta	Softcopy file pdf	Selama berlaku	https://jdih.jakarta.go.id/

INFORMASI KHUSUS								
1	eoffice.jakarta.go.id	Aplikasi naskah dinas Elektronik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Bagian Peraturan Perundang - undangan I	Subbagian Tata Usaha Biro	2025, Jakarta	Softcopy file pdf	Selama berlaku	https://eoffice.jakarta.go.id/

C INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA								
INFORMASI KHUSUS								
1	Data PJLP Biro Hukum	Informasi data pegawai Non ASN Subagian advokasi hukum dan subbagian tata usaha	Bagian Peraturan Perundang - undangan I dan Bagian Advokasi Hukum	Subbagian Tata Usaha Biro	2026, Jakarta	Softcopy file pdf	Selama berlaku	Subbagian tata usaha biro

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI
DKI JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP. 197612062002121009